Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Economics
Universitas Islam Sultan Agung
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 13818-13822

Dampak Hambatan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Terhadap Legitimasi Politik Di Kota Palembang

Romi Abdillah[1], Heri Junaidi[2], Ibrahim Miftafariz Mirza[3]
[123]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia
Corresponding Author: romiiabdii5@gmail.com

Published: February 2026

ABSTRAK

Pemilu sebagai pilar utama demokrasi menuntut penyelenggaraan yang berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya. Salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran Pemilu adalah distribusi logistik, karena kendala dalam proses ini berpotensi memengaruhi tahapan pelaksanaan serta persepsi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang serta dampaknya terhadap legitimasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses distribusi logistik Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pengiriman logistik meliputi kendala teknis dan operasional, faktor geografis di wilayah tertentu seperti Pulo Kerto, Keramasan, dan Pulau Kemarau, kondisi cuaca, human error, serta kebutuhan koordinasi antarpenyelenggara pemilu. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, penyelenggara pemilu mampu mengantisipasi dan menangani kendala tersebut melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas lembaga, pengawasan berlapis, serta dukungan pengamanan dari aparat Polri dan TNI. Dampak hambatan lebih dirasakan pada aspek kesiapan dan kenyamanan pelaksanaan serta pembentukan persepsi masyarakat. Secara umum, legitimasi politik Pemilu 2024 di Kota Palembang tetap terjaga karena masyarakat menerima proses pemilu sebagai sah dan dapat dipercaya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan efektivitas distribusi logistik di masa mendatang.

Keywords: Logistik pemilu, legitimasi politik, tata kelola pemilu, distribusi logistik, Pemilu 2024.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, whic h permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material i n this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendistribusian merupakan proses penyaluran dan pengiriman perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dari suatu lokasi asal menuju daerah tujuan. Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian jumlah dan jenis perlengkapan yang dikirim, ketepatan waktu pengiriman, kejelasan alamat tujuan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan anggaran yang berlaku. Seluruh kegiatan pendistribusian tersebut disusun dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan guna menjamin kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu. (Ayuning Rostiati 2023) Penyelenggara pemilu melakukan berbagai persiapan dalam membangun sistem distribusi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung logistik guna menjamin proses penyaluran logistik pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Sistem pendistribusian logistik dirancang secara terstruktur dan berjenjang, dimulai dari penyimpanan logistik di gudang KPU sebagai pusat distribusi. Selanjutnya, logistik disalurkan sesuai dengan pembagian wilayah kerja menuju tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, logistik pemilu diteruskan kepada badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), agar seluruh kebutuhan pemilu dapat terpenuhi hingga ke tingkat paling bawah dalam penyelenggaraan pemilu. (rafli, 2022) KPU menjalin kerja sama dengan berbagai pihak pendukung guna menunjang kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kerja sama tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang telah tersedia, serta didukung oleh penggunaan teknologi pelacakan dan sistem

pengamanan logistik.
Melalui upaya ini, proses penyaluran logistik pemilu ke ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan akses, diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan aman, serta tetap sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. (Sagala, 2024) Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menunjang kelancaran pemilu adalah pengelolaan dan pendistribusian logistik, karena ketersediaan logistik yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran menjadi prasyarat utama terselenggaranya pemungutan suara secara efektif. Hambatan dalam pengiriman logistik berpotensi mengganggu tahapan pemilu serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Palembang, pengiriman logistik menghadapi sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis di wilayah tertentu, faktor cuaca, kendala teknis dan operasional, serta kompleksitas koordinasi antarpenyelenggara pemilu. Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga berimplikasi pada persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Persepsi ini berkaitan erat dengan legitimasi politik, yaitu sejauh mana masyarakat menerima proses dan hasil pemilu sebagai sah dan dapat dipercaya.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang serta dampaknya terhadap legitimasi politik. Sebagian besar tahapan dalam pengelolaan logistik tersebut masih dilaksanakan secara manual dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian logistik, menjadi rentan terhadap kekeliruan. Keterbatasan tersebut meningkatkan potensi terjadinya kesalahan manusia (human error), yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketepatan, efisiensi, dan kelancaran penyelenggaraan logistik pemilu. (Zulkarnaen, 2020) Logistik merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengadaan barang, proses penyimpanan, pengangkutan, serta pendistribusian, yang disertai dengan pengelolaan informasi secara terintegrasi. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa barang atau perlengkapan dapat sampai ke lokasi tujuan dalam kondisi yang baik, sesuai kebutuhan, dan tepat waktu. (Tulus Sihombing 2024)

METODE

Study participants

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 serta implikasinya terhadap legitimasi politik di Kota Palembang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para aktor yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pada aspek distribusi logistik. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Moleong, 2021).

Study organization

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pendistribusian logistik Pemilu, seperti penyelenggara pemilu dan pihak pendukung terkait. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, laporan penyelenggaraan pemilu, regulasi KPU, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif serta memperkuat validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2022). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diseleksi serta dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu hambatan pengiriman logistik dan dampaknya terhadap legitimasi politik. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antarfenomena.

Statistical analysis

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan konsistensi data dan kerangka konseptual legitimasi politik, yaitu penerimaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu sebagai sesuatu yang sah dan dapat dipercaya (Easton, 1965). Setiap hambatan yang muncul dalam proses distribusi logistik, baik yang bersumber dari faktor teknis, geografis, maupun koordinasi kelembagaan, berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan suara serta membentuk persepsi publik terhadap profesionalisme penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada upaya penanganan hambatan logistik serta dampaknya terhadap penerimaan masyarakat terhadap proses Pemilu, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara distribusi logistik dan legitimasi politik di Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang telah diatur melalui sistem distribusi berjenjang dari KPU Kota hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan yang ketat. Logistik pemilu diwajibkan tetap steril dan tidak boleh dititipkan di rumah warga maupun aparatur negara hingga waktu pemungutan suara, kecuali dalam kondisi darurat tertentu. Meskipun alur distribusi telah disusun secara sistematis, potensi hambatan tetap muncul mengingat skala dan kompleksitas Pemilu 2024 yang besar, serta keterbatasan waktu pengiriman yang maksimal dilakukan lima hari sebelum hari pemungutan suara. Faktor geografis dan kondisi cuaca turut menjadi tantangan, sehingga dilakukan pemetaan wilayah dan penetapan prioritas distribusi, termasuk pemanfaatan jalur sungai untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas. Seluruh proses distribusi logistik tersebut dilakukan dengan pengawalan aparat keamanan guna menjamin ketepatan dan keamanan pengiriman. Hambatan distribusi logistik terutama dirasakan di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis khusus, seperti daerah pesisir, wilayah perbatasan, serta kawasan yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi air. Ketergantungan pada jalur sungai menyebabkan proses distribusi menjadi lebih rentan terhadap perubahan cuaca, terutama pada saat hujan atau banjir, yang dapat memperlambat pengiriman logistik. Meskipun demikian, pelaksanaan Pemilu secara umum dinilai berjalan sah, adil, dan relatif lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dengan tertib serta diterima oleh masyarakat. Namun, potensi kendala di lapangan tetap perlu diantisipasi, khususnya yang berkaitan dengan bencana alam dan kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (human error) dalam aspek teknis penyelenggaraan, agar tidak mengganggu kualitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu. Namun masi sedikit terdapat kecurigaan.

A. Hambatan Dalam Pengiriman Logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang

hambatan distribusi logistik tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia mencakup keterbatasan sumber daya petugas di lapangan, tingkat kelelahan kerja menjelang hari pemungutan suara, serta tingginya kebutuhan koordinasi lintas penyelenggara dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas dan ketepatan distribusi logistik pemilu. Selain faktor manusia, kondisi alam juga menjadi kendala signifikan dalam pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang. Curah hujan yang tinggi serta banjir di beberapa wilayah menyebabkan akses jalan tergenang dan menghambat mobilitas distribusi logistik menuju TPS. Meskipun sistem penandaan logistik berbasis barcode telah diterapkan untuk meminimalkan risiko tertukarnya perlengkapan pemilu, distribusi logistik masih menghadapi kendala di wilayah dengan akses terbatas, seperti daerah 3T dan kawasan pesisir sungai, terutama pada musim hujan dan banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan distribusi logistik bersifat multidimensional dan memerlukan strategi mitigasi yang adaptif terhadap faktor manusia maupun kondisi alam. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan penelusuran berbagai sumber pemberitaan, terdapat sejumlah wilayah di Kota Palembang yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya terkait distribusi logistik. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus yang rawan bencana karena berada di pesisir Sungai Musi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, serta Pulau Kemaro di Kecamatan Ilir Timur II yang memiliki tingkat aksesibilitas rendah karena berada di tengah Sungai Musi dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi air. Selain itu, Kelurahan Keramasan di

Kecamatan Kertapati juga menghadapi hambatan distribusi akibat keterbatasan akses darat dan ketergantungan pada jalur sungai, yang semakin menyulitkan pengiriman logistik pada saat hujan atau banjir. Kendala distribusi logistik juga berdampak pada beberapa TPS, seperti TPS 15 di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, TPS 25 di Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, dan TPS 35 di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat ditemukannya ketidaksesuaian dan dugaan pelanggaran dalam proses distribusi dan penggunaan logistik pemilu yang berpotensi memengaruhi integritas pemungutan suara.

B. Implikasi Hambatan Distribusi Logistik Pemilihan Umum 2024 Di Kota Palembang

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas dan ketepatan penyelenggaraan pemilu. Kondisi geografis tertentu, keterbatasan akses transportasi, serta faktor cuaca seperti hujan dan banjir menyebabkan distribusi logistik tidak selalu berjalan sesuai perencanaan dan dalam beberapa kasus harus mengalami penundaan. Meskipun KPU Kota Palembang telah menerapkan sistem penandaan berbasis barcode untuk menjamin ketepatan jumlah dan identitas logistik di setiap TPS, hambatan fisik di lapangan tetap sulit dihindari, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Situasi ini menuntut penyesuaian teknis serta penggunaan waktu dan sumber daya tambahan, sekaligus meningkatkan beban kerja bagi PPS dan KPPS dalam memastikan logistik tetap aman dan siap digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika dan kendala di lapangan. Keterlambatan distribusi logistik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu. Namun, melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan jalur alternatif, serta pengawasan berlapis, kualitas pelayanan pemilih tetap dapat dijaga meskipun menghadapi berbagai hambatan distribusi. Meskipun pendistribusian logistik Pemilu 2024 menghadapi berbagai hambatan, upaya penyelenggara melalui koordinasi lintas lembaga, pengawasan berlapis, dan transparansi proses distribusi mampu membentuk persepsi positif di kalangan masyarakat, sehingga kepercayaan publik dan legitimasi politik tetap terjaga. Namun, apabila hambatan logistik seperti keterlambatan pengiriman, perubahan lokasi TPS, atau sulitnya akses dirasakan langsung oleh pemilih tanpa disertai penjelasan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan melemahkan legitimasi politik karena munculnya keraguan terhadap kualitas dan keadilan proses pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang terutama terjadi pada aspek geografis dan koordinasi antarpenyelenggara pemilu. Kondisi geografis tertentu yang termasuk dalam kategori wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terjauh, dan terdalam, serta pengaruh cuaca yang tidak menentu menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran distribusi logistik. Situasi tersebut berdampak pada terjadinya keterlambatan pengiriman dan belum optimalnya koordinasi antara penyelenggara pemilu di tingkat kota dengan petugas pelaksana di lapangan, khususnya di wilayah dengan akses terbatas. Dampak hambatan pengiriman logistik terhadap legitimasi politik Pemilu 2024 di Kota Palembang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa proses dan hasil pemilu tetap sah dan dapat diterima, sehingga legitimasi politik tetap terjaga. Namun, sebagian lainnya memandang bahwa hambatan tersebut mencerminkan kurangnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, yang berpotensi menimbulkan keraguan serta kecurigaan terhadap kualitas dan keadilan hasil pemilu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian, dukungan, serta kemudahan akses data dan informasi selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terjauh, dan Terdalam), khususnya di Kelurahan Pulokerto, yang telah berpartisipasi aktif serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengalaman terkait proses pendistribusian logistik Pemilu. Ucapan terima

kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran akademik secara berkesinambungan sejak tahap perencanaan hingga penyusunan karya ilmiah ini. Seluruh dukungan dan kontribusi tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran penelitian dan penyelesaian karya ilmiah ini.

REFERENSI

ANTARA/Ahmad Rafli(2022) KPU Kota Palembang tetapkan daftar pemilih berkelanjutan mencapai 1.004.155 orang

Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley.

Endah Ayuning Rostiati. "Manajemen Risiko Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis Coso Enterprise Risk Management". Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 5 No. 1, (2023)

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sagala, J.P., Fikri, A.F. & Vikri, A. 'Analisis penerapan sistem manajemen transportasi logistik pemilu berbasis IoT di Indonesia', COSTING, 7(6). (2024)

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tulus Martua Sihombing, Irayanti Adriant, Putri Julianti Rahma "Analisis Kualitas Kemasan Logistik PT. Pos Indonesia Bandung untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen (Studi Kasus : PT. Pos Indonesia Bandung)" Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2024)

Wandy Zulkarnaen, Iis Dewi Fitriani, Nina Yuningsih. "Pengembangan Supply Chain Managementdalampengelolaan Distribusi Logistik Pemiluyanglebihtepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktuberbasishuman Resources Competency Developmentdi Kpu Jawa Barat" JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, (2020)